

Korelasi Korupsi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kesuksesan *E-Government* di Suatu Negara

Dien Novita
Sistem Informasi
STMIK Global Informatika MDP
Palembang, Indonesia
dien@stmik-mdp.net

Abstrak—*E-Government* didefinisikan sebagai bentuk layanan pemerintah yang berbasis elektronik. Bentuk layanan pemerintah tersebut mempunyai banyak keunggulan dibandingkan cara konvensional yang belum memanfaatkan teknologi informasi. Sebagian besar negara-negara di dunia telah menerapkan bentuk layanan ini. Untuk menyelenggarakan layanan pemerintahan yang berbasis elektronik tersebut, tentulah bukan hal yang mudah. Ada banyak faktor untuk terselenggara dengan sukses. Faktor-faktor kesuksesan implementasi *E-Government* antara lain ditentukan oleh faktor persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Adanya penyimpangan anggaran seperti terjadinya korupsi tentunya akan menghambat kesuksesan implementasi *E-Government*. Selain faktor tersebut, faktor dari dukungan penduduk sebagai stakeholder utama dari *E-Government* tentunya juga sangat menentukan sukses tidaknya implementasi *E-Government*. Maka dari itu penelitian ini dibuat untuk melihat korelasi atau hubungan korupsi dan jumlah penduduk terhadap kesuksesan implementasi *E-Government* di suatu negara. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi berganda menggunakan software AMOS 16 dan SPSS 19. Dari hasil pengolahan data terhadap 163 negara sebagai sampel penelitian untuk data peringkat *E-Government* dunia oleh *E-Government Survey 2012* oleh PBB, dari UNDP untuk peringkat jumlah penduduk dunia 2012, dan dari *Transparency International 2012* untuk peringkat korupsi dunia, diperoleh hasil bahwa korupsi dan jumlah penduduk secara bersama-sama berkorelasi kuat terhadap kesuksesan implementasi *E-Government* suatu negara dengan nilai r sebesar 0,75 dan koefisien determinasi R^2 sebesar 56,3%.

Kata Kunci—*E-Government*; korupsi; penduduk; regresi; AMOS; SPSS

I. PENDAHULUAN

Konsep *E-Government* dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai definisi mengenai *E-Government* sesuai dengan sudut pandang sistem pemerintahan. *E-Government* sebagai penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintahan, seperti: *Wide Area Networks*, *Internet*, dan *Mobile Computing*, dengan kemampuan untuk merubah hubungan antara warga negara, para bisnis, dan badan pemerintah lainnya [1]. Dijelaskan pula oleh Legislative

Analyst's Office (2006), bahwa *E-Government* merupakan proses transaksi bisnis antar masyarakat dan pemerintah melalui penggunaan sistem yang terotomatisasi dan jaringan internet, biasanya disebut dengan *World Wide Web*.

E-Government merupakan salah satu alat untuk mewujudkan tujuan organisasi dan mengarahkan kepada tata pemerintahan yang baik. Diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pendapatnya mengenai pemerintahan, dalam hal ini *website E-Government* harus bersifat interaktif (minimal ada alamat *e-mail* yang secara teratur dibaca dan dibalas) agar masyarakat bisa menyampaikan usulan, teguran, atau hal lainnya mengenai institusi yang bersangkutan. Masyarakat dapat mengawasi jalannya institusi terkait dengan melihat berbagai kegiatan institusi tersebut [2].

Kesamaan karakteristik dari beberapa definisi *E-Government*[13], adalah :

1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (*modern*) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*)
2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet)
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama ini berjalan.

Beberapa implementasi yang bisa diterapkan pada penyelenggaraan *E-Government* diantaranya adalah :

1. Penyediaan sumber informasi yang sering dan banyak dicari masyarakat seperti potensi daerah, pendapatan daerah, komoditas daerah serta kualitas sumber daya masyarakat di suatu daerah.
2. Penyediaan mekanisme akses melalui kios informasi yang tersedia di kantor pemerintahan dan tempat publik sehingga menjamin kesetaraan kesempatan mendapat informasi.
3. *E-procurement* ; pemerintah dapat melakukan tender secara *on line* dan transparan.

II. Faktor Kesuksesan E-Government

Suatu negara yang akan mengimplementasikan *E-Government* tentulah akan menyusun suatu perencanaan strategis yang matang agar dapat sukses dan bermanfaat bagi

seluruh pengguna layanan tersebut. Faktor-faktor yang mendukung kesuksesan implementasi *E-Government* di suatu negara dari beberapa sumber, dirangkum dalam tabel 1 di bawah ini.

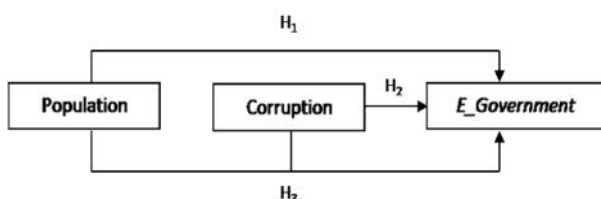
Tabel 1. Faktor Kesuksesan E-Government

Faktor Kesuksesan E-Government	Variabel	Sumber
Faktor Kesuksesan E-Government	- Visi, Objektif, dan Strategi - Hukum dan Peraturan - Struktur Organisasi - Proses Bisnis - Teknologi Informasi	ESCAP/APCICT[3]
	- Support - Capacity - Value	Harvard JFK School of Government[13]

Faktor kesuksesan *E-Government* [3] dari variabel *Visi, Objektif, dan Strategi* salah satunya dijelaskan oleh parameter adanya dukungan yang kuat dari masyarakat. Artinya semakin besar jumlah penduduk suatu negara maka semakin besar pula dukungannya terhadap kesuksesan implementasi *E-Government*. Sedangkan untuk variabel *Struktur Organisasi* salah satunya dijelaskan oleh parameter adanya persiapan dan pelaksanaan anggaran oleh lembaga pemerintahan sebagai penyelenggara.

Faktor kesuksesan *E-Government* [13] dari variabel *Support* dijelaskan oleh parameter adanya dukungan yang kuat dari lembaga birokrat sebagai penyelenggara dan dukungan masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain itu dari variabel *Capacity* dijelaskan oleh parameter adanya ketersediaan sumber daya yang utama, yaitu finansial.

Dari kajian kedua faktor kesuksesan diatas, terlihat bahwa faktor yang pertama persiapan dan pelaksanaan anggaran atau pengaturan finansial sangatlah penting di dalam menentukan kesuksesan implementasi *E-Government*. Tetapi bagaimana jika di dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan seperti adanya korupsi. Apakah hal ini akan menghambat kesuksesan implementasi *E-Government* atau sama sekali gagal. Untuk faktor yang kedua, dilihat dari faktor masyarakat, dukungan yang kuat dari masyarakat akan berdampak terhadap kesuksesan *E-Government*. Dalam kenyataannya, suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar tentulah juga mempunyai dukungan yang kuat, jika dibandingkan dengan negara yang jumlah penduduknya sedikit. Tetapi apakah hal tersebut dapat dibuktikan. Maka dibuatlah penelitian ini dengan model penelitian seperti gambar 1 berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

Dari gambar model penelitian di atas, terlihat akan ada tiga pengujian hipotesis tentang hubungan jumlah penduduk (*population*) dan korupsi (*corruption*) terhadap kesuksesan *E-Government* untuk hipotesis 1 (H_1) dan hipotesis 2 (H_2) serta hubungan atau korelasi

bersama antara kedua faktor tersebut terhadap kesuksesan *E-Government* (H_3).

III. METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah negara-negara di dunia yang telah menerapkan *E-Government*. Untuk memudahkan penelitian, diambil sampel dengan metode *purposive sampling* sebanyak 163 negara yang memiliki data peringkat *E-Government*, tingkat korupsi, dan peringkat jumlah penduduk.

B. Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari *E-Government Survey 2012* oleh PBB untuk data peringkat *E-Government*, dari UNDP untuk peringkat jumlah penduduk dunia 2012, dan dari *Transparency International 2012* untuk tingkat korupsi negara-negara di dunia.

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah menguji ada tidaknya korelasi dan seberapa besarnya jika ada korelasi antara kesuksesan *E-Government* dengan tingkat korupsi dan jumlah penduduk suatu negara. Adapun formulasi hipotesisnya sebagai berikut:

1) Hipotesis 1

H_0 : Jumlah penduduk suatu negara tidak berkorelasi dengan kesuksesan *E-Government*

H_1 : Jumlah penduduk suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government*

2) Hipotesis 2

H_0 : Tingkat korupsi suatu negara tidak berkorelasi dengan kesuksesan *E-Government*

H_1 : Tingkat korupsi suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government*

3) Hipotesis 3

H_0 : Jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama tidak berkorelasi dengan kesuksesan *E-Government*

H_1 : Jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government*

D. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam variabel eksogen (bebas) dan variabel endogen (terikat). Variabel eksogen terdiri atas variabel *population* (X_1) dan *corruption* (X_2), sedangkan variabel endogen yaitu *E-Government* (Y). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh negara yang telah menerapkan *E-Government*. Berdasarkan [4] menemukan bahwa ukuran sampel yang diuji dengan *structural equation modeling* yang sesuai antara 100-200 [5]. Untuk penelitian ini diambil sampel sebanyak 163 negara. Penelitian ini menggunakan alat analisis *Structural Equation Modelling* dari paket software statistik AMOS 16.0 dalam model dan pengujian hipotesis.

Adapun kriteria penerimaan hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis dapat diterima jika memiliki nilai C.R pada *table regression weight output* AMOS yang lebih besar dari t-tabel atau memiliki probability value di bawah 0.01

IV. ANALISIS DATA PENELITIAN

Data yang telah diambil, lalu disusun, dan diuji normalitas data setiap variabelnya dan diuji *goodness of fit* modelnya. Hasil analisis model persamaan structural secara keseluruhan disajikan sebagai berikut:

A. Normalitas Data

Normalitas data diuji menggunakan *software* statistik SPSS 19, diperoleh hasil bahwa data berdistribusi normal, artinya layak untuk dilakukan pengolahan statistik lebih lanjut.

B. Pengujian Hipotesis

Berndasarkan hasil uji output untuk korelasi antara jumlah penduduk, tingkat korupsi, dan kesuksesan *E-Government* diperoleh nilai korelasi seperti tabel 2 berikut:

Tabel 2. Koefisien Korelasi Berganda

Korelasi	Population (X ₁)	Corruption (X ₂)	E_Government (Y)
Population (X ₁)	1	0,27	0,021
Corruption (X ₂)	0,27	1	0,728
E_Government (Y)	0,021	0,728	1

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa *Corruption* berkorelasi positif dan cukup signifikan terhadap kesuksesan *E-Government* dengan koefisien korelasi 0,728, artinya berkurangnya korupsi di suatu negara, maka akan meningkatkan kesuksesan *E-Government*. Sedangkan untuk *Population* juga berkorelasi positif terhadap kesuksesan *E-Government*, tetapi sangat rendah hanya 0,021.

Untuk korelasi antara jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama terhadap kesuksesan *E-Government* dapat dilihat dari tabel 3 berikut:

Tabel 3. R Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,750 ^a	0,563	0,557	31,399

Dari tabel 3 diatas diketahui besarnya nilai koefisien korelasi antara tingkat korupsi dan jumlah penduduk secara bersama-sama berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government* suatu negara sebesar 0,750. Jadi kesimpulan untuk hipotesis penelitian yang diterima adalah:

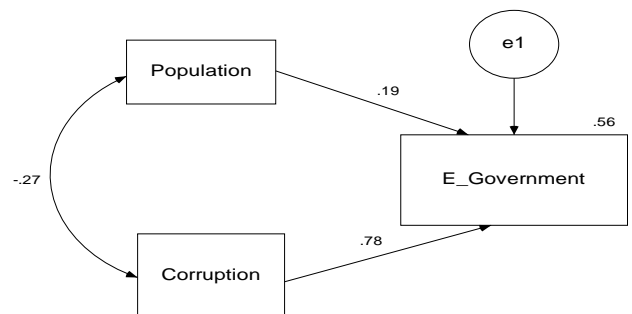
- 1) H₁: Jumlah penduduk suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government*.
Artinya jumlah penduduk suatu negara berkorelasi terhadap kesuksesan *E-Government*, semakin banyak jumlah penduduk, berarti semakin banyak dukungan

penduduk sehingga makin sukses penerapan *E-government*.

- 2) H₁: Tingkat korupsi suatu negara berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government*
Artinya tingkat korupsi suatu negara berkorelasi terhadap kesuksesan *E-Government*, semakin tinggi tingkat korupsinya, semakin sulit mencapai kesuksesan penerapan *E-Government*.
- 3) H₁: Jumlah penduduk dan tingkat korupsi secara bersama-sama berkorelasi positif dengan kesuksesan *E-Government*
Artinya tingkat korupsi suatu negara dan jumlah penduduknya berkorelasi secara bersama-sama terhadap kesuksesan penerapan *E-Government*, semakin berkurangnya korupsi dan meningkatnya jumlah penduduk, semakin besar kemungkinan mencapai kesuksesan penerapan *E-Government*.

C. Regresi Berganda

Hasil analisis model persamaan structural secara keseluruhan dengan menggunakan *software* AMOS disajikan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Hasil Penelitian

Model persamaan structural diatas menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,19 untuk variabel *population* (X₁) dan koefisien regresi sebesar 0,78 untuk variabel *corruption* (X₂). Untuk melihat hasil pengujian terhadap model penelitian yang diformulasikan dapat juga dilihat dari *Regression Weight*, seperti disajikan pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Regression Weights

	Estimate	S.E.	C.R.	P	Label
E_Government <--- Population	0,189	0,054	3,512	***	
E_Government <--- Corruption	0,779	0,054	14,438	***	

Nilai koefisien *population*(X₁) sebesar 0,189 menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah penduduk sebesar 1 satuan akan meningkatkan kesuksesan *E-government* sebesar 0,297. Dan nilai koefisien *corruption*(X₂) sebesar 0,779 menunjukkan bahwa bertambahnya peringkat korupsi (peringkat korupsi diurutkan dari tingkat korupsi rendah sampai yang paling

tinggi) sebesar 1 satuan akan meningkatkan kesuksesan *E-government* sebesar 0,297.

V. KESIMPULAN

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan kesuksesan implementasi *E-Government*, yaitu:

1. Terbukti bahwa benar ada korelasi antara korupsi dengan kesuksesan implementasi *E-Government* di suatu negara. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengolahan data untuk nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,728 yang bermakna korelasi yang cukup kuat.
2. Juga terbukti benar bahwa ada korelasi antara jumlah penduduk dengan kesuksesan implementasi *E-Government* di suatu negara. Walaupun korelasi lemah, seperti ditunjukkan dari hasil pengolahan data untuk nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,021. Artinya jumlah penduduk yang banyak belumlah tentu mendapat dukungan yang besar untuk kesuksesan implementasi *E-Government*.
3. Jika dilihat secara bersama-sama korelasi kedua faktor pendukung kesuksesan implementasi *E-Government* tersebut diperoleh hasil 0,750 dengan kontribusi sebesar 56,3%. Artinya dari nilai koefisien korelasinya, cukup kuat, dan sebesar 56,3 % dapat menentukan kesuksesan *E-Government*. Sisanya sebesar 43,7% ditentukan oleh faktor-faktor lain.
4. Kesuksesan *E-Government* di suatu negara akan sulit tercapai jika tingkat korupsinya masih tinggi, sedangkan untuk negara yang padat penduduknya tidak dapat menjamin untuk kesuksesan implementasi *E-Government*.

REFERENSI

- [1] World Bank. "e-Government for All – Review of International Experience with Enhancing Public Access, Demand and Participation in e-Government Services: Toward a Digital Inclusion Strategy for Kazakhstan". ISG e-Government Practice Technical Advisory Note (Draft version 30 June 2006).
- [2] Liikanen, Erkki. "E-Government and the European Union". The European Journal for the Informatics Professional, Vol. IV, No. 2. April 2003.
- [3] ESCAP/APCICT. "Akademi Esensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pimpinan
- [4] Hair, Jr., Joseph F. dan Anderson, Rolph E. dan Tatham, Ronald L. & Black, William C. "Multivariate Data Analysis". Fourth Edition. New Jersey: Prentice hall, Inc. 1995.
- [5] Ghozali, I. "Structural Equation Modelling (Teori, Konsep dan Aplikasi dengan Program AMOS 16.0)". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 2008.
- [6] United Nations E-Government Survey 2012: E-Government For The People, <http://www.un.org/en/development/desa/publications/connecting-governments-to-citizens.html>
- [7] Corruption Perception Index – 2012, <http://cpi.transparency.org/cpi2012/>
- [8] International Human Development Indicators, Population – 2012, <http://hdr.undp.org>
- [9] Rokhman. Ali, "E-Government Adoption in Developing Countries; the Case of Indonesia", Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences, vol. 2, no.5, ISSN 2079-8407, May. 2011.
- [10] Sinambela. Josua M., "E-Government di Indonesia dan Dunia", Information Technology Consultant, STTA Yogyakarta, www.rootbrain.com, June 18th, 2011
- [11] Dahlan. Nariman, "Development of E-Government in Indonesia : A Strategy Model and Its Achievements", Ritsumeikan Asia Pacific University
- [12] Hasan. M.Iqbal, "Pokok-Pokok Materi Statistik 2 (Statistik Infrensif)", Bumi Aksara, Jakarta, 2005
- [13] Indarjit. Richardus Eko, "Electronic Government", Yogyakarta : Andi, 2004